



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**  
**TAHUN 2023**

**LKIP**



**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

[dinaskominfomabare@gmail.com](mailto:dinaskominfomabare@gmail.com)  
[www.kominfo.manggaraibaratkab.go.id](http://www.kominfo.manggaraibaratkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Anugerah dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Manggarai Barat telah menyelesaikan berbagai program kerja yang menjadi target di tahun 2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kominfo ikut andil dalam menyukseskan transformasi digital yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat selama ini. Transformasi digital menjadi suatu keharusan. Perubahan perilaku masyarakat mulai dari cara bekerja, beraktivitas, belajar mengajar, hingga pola konsumsi serta perubahan perilaku lain secara tidak langsung menjadi akselerator transformasi digital.

Sebagai bukti mendukung penerapan transformasi digital Dinas Kominfo di tahun 2023 mampu meningkatkan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemda Manggarai Barat yaitu nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari sebelumnya 3,01 menjadi 3,44. Persentase pelayanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2023 juga meningkat dari sebelumnya 83,33% menjadi 84,62% dan target kinerja Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana sebelumnya 51,22% meningkat menjadi 58,54%.

Namun meskipun dengan tercapainya target kinerja kami tetap berharap, Laporan Kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 ini, akan mendapatkan umpan balik dari masyarakat, menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas bagi peningkatan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat. Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian kedepan.

Labuan Bajo, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai Barat

  
**Paulus Setahu, S. Sos.**

Pembina Tk. I

NIP. 196806292000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud & Tujuan ..... 2

1.3. Struktur Organisasi ..... 2

1.4. Tugas dan Fungsi ..... 5

1.4.1. Tugas Pokok .....5

1.4.2. Fungsi.....5

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis ..... 6

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ..... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 8

2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026 ..... 8

2.1.1. Visi.....9

2.1.2. Misi .....10

2.1.3. Tujuan & Sasaran.....11

2.1.4. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....11

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 - 2026 ..... 14

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ..... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 17

3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ..... 18

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....19

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....19

3.2. Realisasi Anggaran..... 60

BAB IV PENUTUP ..... 69

4.1. KESIMPULAN ..... 69

4.2. SARAN ..... 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi ..... 4

Gambar 3. 1. Grafik Perbandingan Antara aspek target dan Aspek SPBE  
Indeks pada Hasil Evaluasi tahun 2023 ..... 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat ..... 6

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 ..... 11

Tabel 2. 2 Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ..... 12

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 15

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun .... 16

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..... 18

Tabel 3. 2 Intepretasi atas pencapaian sasaran ..... 19

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023 ..... 19

Tabel 3. 4 Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023..... 20

Tabel 3. 5 Daftar Layanan Publik Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Manggarai Barat ..... 26

Tabel 3. 6 Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ..... 28

Tabel 3. 7 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2022 dan 2021 30

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2021 - 2026 ..... 31

Tabel 3. 9 Aspek penilaian SPBE tahun 2023 ..... 32

Tabel 3. 10 Daftar nama aplikasi layanan publik secara online dan terintegrasi 33

Tabel 3. 11 Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ..... 34

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2023 dengan target nasional ..... 36

Tabel 3. 13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja ..... 39

Tabel 3. 14 Perhitungan efisiensi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ..... 40

Tabel 3. 15 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis ..... 43

Tabel 3. 16 Daftar aplikasi Layanan publik yang terintegrasi tahun 2023 ..... 45

Tabel 3. 17 Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi tahun 2023 ..... 46

Tabel 3. 18 Daftar aplikasi untuk penyelenggaraan e-government Pemda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 ..... 47

Tabel 3. 19 Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government tahun 2023 ..... 48

Tabel 3. 20 Daftar diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Tahun 2023 ..... 51

Tabel 3. 21 Daftar komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda Kabupaten Manggarai Barat ..... 53

Tabel 3. 22 Daftar OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2023 ..... 56

Tabel 3. 23 Daftar Aplikasi persandian yang diterapkan dalam aplikasi SPBE... 58

Tabel 3. 24 Daftar capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis Perangkat Daerah ..... 59

Tabel 3. 25 Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023 ..... 62

Tabel 4. 1 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 ..... 69

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 menyajikan informasi capaian kinerja, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum cukup dari yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 128,81%. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis tahun 2023 adalah sebesar Rp. **5,694,877,317,-** dan dilakukan perubahan pada APBD-P menjadi Rp. **4,262,747,381,-** dengan serapan sebesar Rp. **3,911,325,676,-** atau 91,76%. Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 telah ditetapkan 1 sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05 Indeks	3,44 Indeks	112,79%	Sangat Baik (A)
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	84,62%	141,03%	Sangat Baik (A)
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	50%	55,81%	111,62%	Sangat Baik (A)
Rata – rata capaian indikator kinerja					121,83%	Sangat Baik (A)

Jika dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah **Sangat Baik**. Namun dari hasil interpretasi sangat baik tersebut, masih terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi dalam



pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, secara garis besar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

**A. Internal:**

1. Terbatasnya jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang menguasai bidang Teknologi Informasi, statistik dan persandian untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan teknologi informasi Komunikasi atau *Information and Communication of Technology (ICT)*;
3. Terbatasnya kemampuan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2023 baik untuk kegiatan pembangunan baru maupun untuk rehabilitasi/perawatan sarana prasarana Komunikasi dan informatika yang ada;
4. Belum tersedianya Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Rasionalisasi anggaran di beberapa sub kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan harus mengalami *refocussing* anggaran yang sangat besar.
6. Kurangnya koordinasi internal aparatur dalam pelaksanaan tugas.

**B. Eksternal**

1. Infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan yang masih kurang memadai untuk menunjang pelayanan publik secara online di wilayah perdesaan;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat Manggarai Barat dalam mendiseminasikan informasi diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Pemahaman aparatur pada masing-masing OPD tentang penyediaan data statistik sektoral yang masih rendah.
4. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi IT untuk pelayanan publik secara online;

**C. Upaya Penanganan Masalah**

1. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Komunika dan Informatika pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistik dan persandian melalui pelatihan dan pendidikan teknis;
2. Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan akses telekomunikasi dan akses internet untuk masyarakat pedesaan Manggarai Barat;



3. Menyusun beberapa regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik online untuk melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Memaksimalkan aparatur yang ada untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin serta meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas;
6. Meninjau kembali kebijakan internal SPBE dan menerbitkan kebijakan internal SPBE baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan harapan dan keinginan seluruh masyarakat, baik itu penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Menurut para ahli ilmu pemerintahan, bahwa salah satu syarat membangun pemerintahan yang baik yaitu mengimplementasikan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan anggaran negara. Implementasi akuntabilitas publik diyakini dapat mengubah penyelenggaraan pemerintah yang tidak berorientasi pelayanan publik dan korup menuju pemerintahan yang demokratis. Manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab pasti akan memiliki dukungan publik. Publik mempercayai apa yang diatur, direncanakan dan dilaksanakan dengan program-program yang berorientasi kepentingan publik. Tanggungjawab penyelenggara pemerintahan mencerminkan kewajiban pemerintah untuk melayani warga negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Penyusunan LKIP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat;
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.2. Maksud & Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tentang tingkat akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati.

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kerja;
- 2) Memberikan gambaran secara jelas, transparan, dan akuntabel tentang keberhasilan/kegagalan Penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian tujuan pada tahun anggaran 2023;
- 3) Sebagai bahan evaluasi penyusunan rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berikutnya.

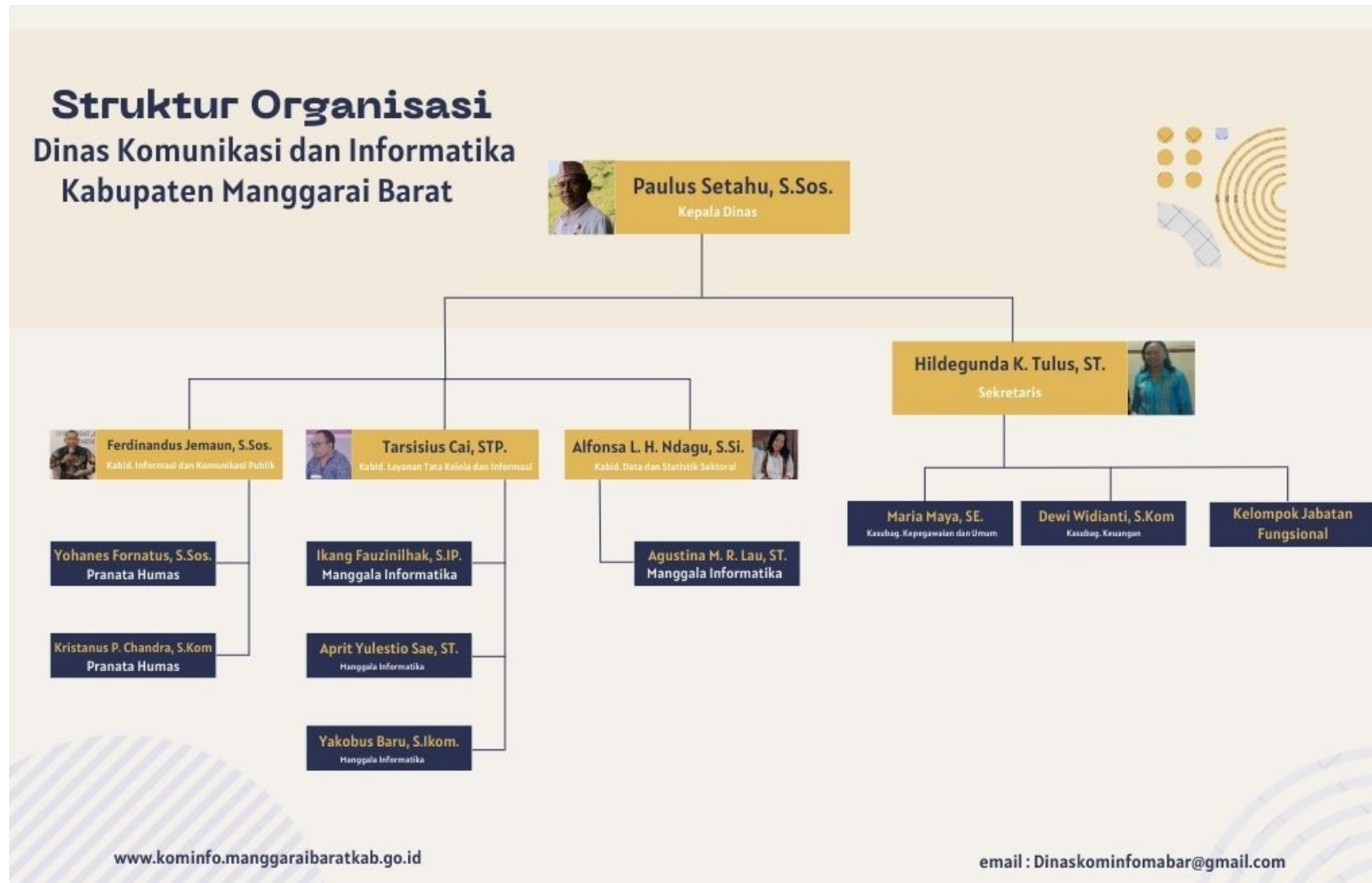
### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian;
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika;
5. Bidang Data dan Statistik Sektoral;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Masing-masing bidang membawahi kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1 dibawah ini menyajikan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



**Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat



**1.4. Tugas dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, adapun tugas dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Tugas Pokok**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang Statistik.

**2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok diatas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
3. penyelenggaraan pengelolaan e-govemment lingkup pemerintah daerah;
4. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
5. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
6. penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
7. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas;
8. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
9. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi.

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Sesuai urusan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan Persandian adalah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam memberikan pelayanan yang kapabel kepada masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital baik untuk proses pembangunan maupun untuk proses peningkatan perekonomian masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah hal yang sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pemetaan permasalahan pelayanan E-Government. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika banyak menghadapi permasalahan – permasalahan strategis yang kami petakan seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1. 1**  
**Pemetaan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1.	Ketersediaan Akses telekomunikasi dan internet diwilayah perdesaan yang masih sangat minim	Masih Kurangnya pembangunan Menara telekomunikasi diwilayah perdesaan untuk memfasilitasi ketersediaan jaringan telekomunikasi dan akses internet	Perlu koordinasi yang baik dengan stakeholder pengembang Menara telekomunikasi serta berkoordinasi dengan Bakti Kemenkominfo untuk pembangunan Menara telekomunikasi di wilayah perdesaan
2.	Indeks Keamanan informasi masih rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemenuhan variabel keamanan informasi belum terlaksana dengan baik.</li><li>▪ Belum tersedianya pedoman keamanan informasi Pemda Kabupaten Manggarai Barat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perlunya peningkatan pengetahuan aparatur pada masing-masing OPD untuk mengamankan informasi melalui proses pendidikan dan pelatihan;</li><li>▪ Perlu penyusunan pedoman teknis tentang tata kelola keamanan informasi</li><li>▪ Perlu penyediaan SDM Dinas Kominfo sebagai tenaga teknis untuk pengamanan informasi</li></ul>
3.	Pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana	Masih kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi untuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perlu peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Dinas Kominfo untuk pemanfaatan teknologi digital</li><li>▪ Perlu meningkatkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan</li></ul>

			masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan perekonomian.
4.	Pengelolaan PPID yang belum optimal	Masih Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan PPID di masing – masing OPD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk PPID pembantu pada masing-masing OPD</li><li>▪ Peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Kominfo</li></ul>
5.	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan</li><li>▪ Belum adanya regulasi sebagai acuan dalam pemanfaatannya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan pemahaman OPD tentang pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur pada masing-masing OPD</li><li>▪ Perlunya penyusunan pedoman pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Kominfo</li></ul>

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas dan Fungsi
- 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV.PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026**

Disamping tugas pokok dan fungsi yang telah disusun sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas, maka disusun pula rencana strategis tahunan (RENSTRA) tahun 2021-2026 sebagai tolok ukur pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas utama sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan penyebaran informasi, maka perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan pelayanan publik dan penyebaran informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan media massa. Salah satu upaya tersebut adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati seperti yang telah dirumuskan.

## 2.1.1.Visi

Visi :

**“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.**

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:
  - **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk “*bangun dari tidurnya*” dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
  - **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.
2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.
  - **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat



dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.

- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

#### **2.1.2.Misi**

**Visi “Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap”**, menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer**. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Pengerak Utama Ekonomi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan misi ke 5 (lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

2.1.3.Tujuan & Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan urusan persandian, dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat yaitu “Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

Sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab yang besar dalam Misi 5 yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani” pada RPJMD 2021-2026, Tujuan RPJMD ini adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis, sehingga diturunkan pada sasaran jangka menengah yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya birokrasi yang kapabel”. Pada tabel 2.1 dibawah ini kami sajikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel

2.1.4.Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat menjalankan 4 program, 13 kegiatan dan

38 sub kegiatan yang dibagi ke 4 bidang yaitu Bidang sekretariat, Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Data dan Statistik. Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2. 2

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I.	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.220.525.281
1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.117.300
(1).	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.370.300
(2).	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.747.000
2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.974.696.581
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.630.681
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.516.400
(3).	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	549.500
3.	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,960,000
(1).	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,960,000
4.	Kegiatan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.394.600
(1).	Sub Kegiatan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.394.600
5.	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	237.500
(1).	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.500
6.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.688.500
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.077.300
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.064.800
(3).	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.424.200
(4).	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.528.100
(5).	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	2.714.800
(6).	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.590.700

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(7).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.526.600
(8).	Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.762.000
7.	Kegiatan	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.430.800</b>
(1).	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000
(2).	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.310.800
8.	Kegiatan	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.300.000</b>
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000
9.	Kegiatan	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.700.000</b>
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.500.000
(2).	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000
II.	Program	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>37.688.300</b>
1.	Kegiatan	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.688.300</b>
(1).	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	348.400
(2).	Sub Kegiatan	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-
(3).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.409.900
(4).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000
(5).	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	-
(6).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	14.330.000
III.	Program	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1.995.541.300</b>
1.	Kegiatan	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.995.541.300</b>
(1).	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.556.389.800
(2).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	93.224.600
(3).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.000.000
(4).	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	59.480.000
(5).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-
(6).	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	211.380.000

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
(7).	Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	27.066.900
IV.	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	8.992.500
1.	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.992.500
(1).	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.150.000
(2).	Sub Kegiatan	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3.842.500
V.	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-
1.	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penyempurnaan kembali IKU tersebut setelah RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Program kegiatan yang dijalankan tahun anggaran 2021-2026 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 02/KEP/HK/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 2. 3  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

	Misi	Tujuan	Sasaran	No IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI: MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP														
	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	2	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	2	Indeks Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,15	2,75	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan capain kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur capaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4  
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran pada Tahun 2023
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05 Indeks
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60 %
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	50 %

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan *stakeholder* Kabupaten Manggarai Barat (Pemda dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat) atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Nomor	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

**3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Kabupaten Manggarai Barat, seperti yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah, maka dapat dilihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka menggunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =  $\frac{Realisasi}{Rencana} \times 100 \%$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja =  $\frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100 \%$

Tabel 3. 2  
Intepretasi atas pencapaian sasaran

No	Rentang capaian	Interprestasi
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (A)
2	Lebih dari 76% s/d 100%	Baik (B)
3	56% s/d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1.1.Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja  
Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023. Pencapaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3  
Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisa si	% Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,05	3,44	112,79%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	84,62	141,03%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	%	50	55,81	111,62%

3.1.2.Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan



Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dan penyebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 4 program dan 12 kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

Tabel 3. 4  
Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Dinas  
Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05 Indeks	3,44 Indeks	112,79 %
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60 %	84,62 %	141,03 %
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan Pembangunan	50 %	55,81 %	111,62 %

Agar tercapainya sasaran strategis “**Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel**”, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sasaran strategis tersebut menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.4 diatas:

1) Indikator Kinerja “**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**”.

Berdasarkan realisasi yang disajikan pada Tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2023 indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, ditargetkan 3,05 indeks dan realisasinya adalah 3,44 indeks, maka realisasi capaian kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan dan jika dipersentasekan capaian tersebut adalah 112,79% dengan Penilaian Realisasi

Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi**, dan interpertasi Sangat Baik (A), hal ini didukung oleh:

- Peningkatan nilai pada Domain Kebijakan SPBE semula nilainya 4,40 menjadi 5,00 di tahun 2023. Domain Kebijakan ini meningkat pada semua tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE.
- Peningkatan nilai pada Domain Tata Kelola SPBE, dimana nilai tahun 2022 adalah 2,60 sedangkan di tahun 2023 meningkat menjadi 2,70. Domain ini terdiri dari tiga aspek yaitu Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggara SPBE. Pada Domain ini yang perlu diperhatikan agar nilai untuk tahun yang akan datang bertambah adalah aspek Perencanaan Strategis SPBE dan aspek Teknologi Informasi khususnya indikator Arsitektur SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.
- Peningkatan pada Domain Manajemen SPBE, dengan nilai pada tahun 2023 adalah 2,64 atau meningkat dari tahun 2022 dengan nilai 2,09. Domain ini memiliki dua aspek yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK. Untuk Audit TIK tahun 2023 nilai tingkat kematangannya adalah 3,00 hal ini diperoleh dari pelaksanaan audit TIK tahun 2023 menggunakan *Tools* dari BSSN (Web audit) sedangkan Nilai tingkat kematangan pada indikator Penerapan Manajemen SPBE sudah mengalami peningkatan dari 1,75 pada tahun 2022 menjadi 2,50 pada tahun 2023. Kedepan diharapkan Penerapan Manajemen SPBE ini lebih ditingkatkan lagi.
- Peningkatan Nilai pada Domain Layanan SPBE dari 3,18 menjadi 3,70. Domain ini terdiri dari dua aspek yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Layanan Publik berbasis elektronik. Untuk Layanan administrasi semula dengan nilai 3,30 meningkat sedikit menjadi 3,50. Sedangkan untuk layanan Publik meningkat cukup signifikan dari 3,00 menjadi 4,00. Untuk layanan Publik di Kabupaten Manggarai Barat telah bertambah layanan yang terintegrasi seperti layanan publik untuk pariwisata, layanan perijinan non oss yang terintegrasi dengan layanan v-tax.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 bahwa Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

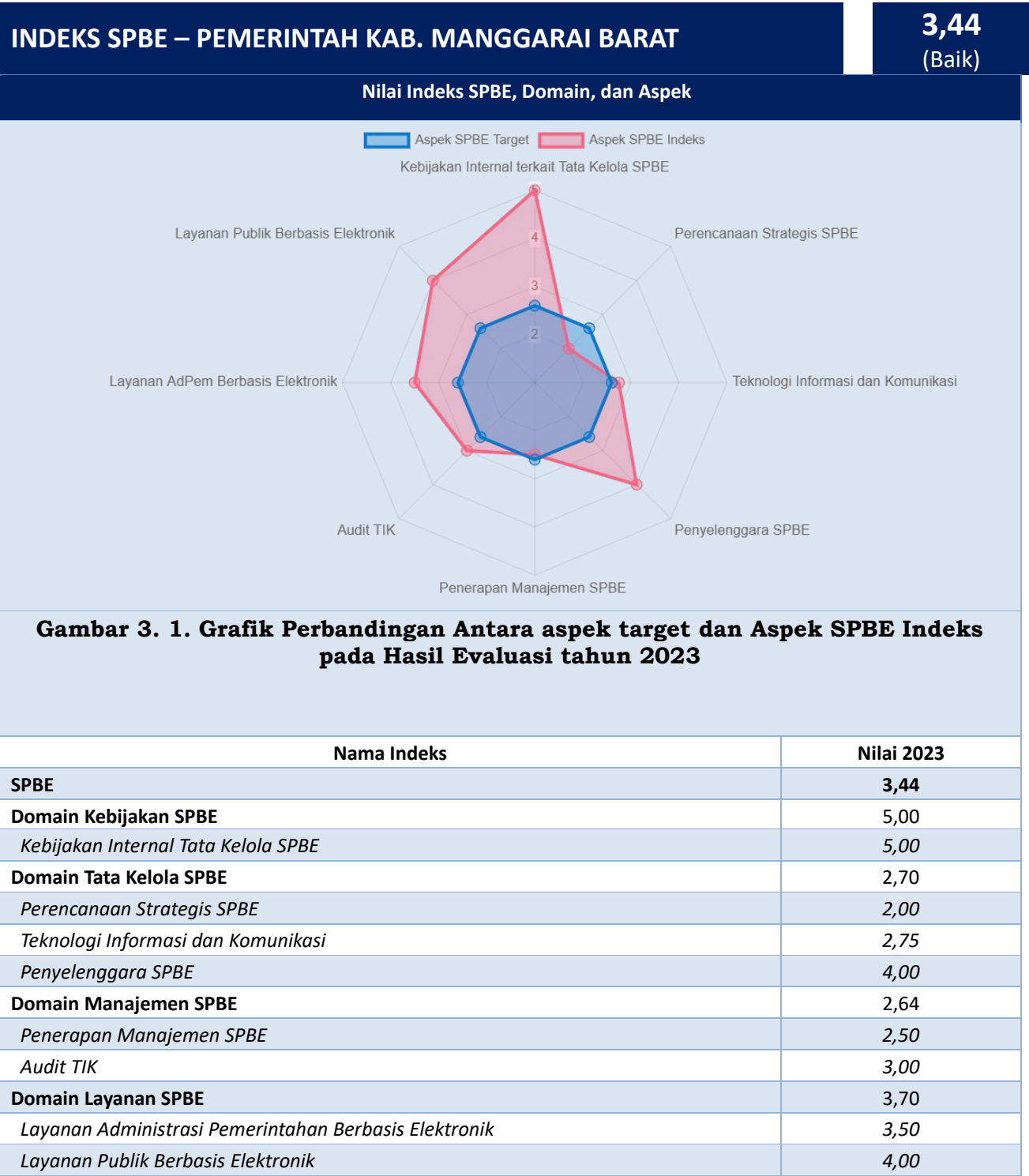
NIP. 197208081996032001

## EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																						
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – &lt; 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – &lt; 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – &lt; 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>&lt; 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)					NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																							
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																							
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																							
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																							
4	1,8 – < 2,6	Cukup																							
5	< 1,8	Kurang																							
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																							
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																							
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																							
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																							
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																							
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																							
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																							
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																							
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																							
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																							
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																							
Indeks		rata-rata Nilai																							
		Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota																	
SPBE		2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50																	
Domain Kebijakan		2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20																	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20																	
Domain Tata Kelola		2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54																	
Perencanaan Strategis		2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26																	
Teknologi Informasi dan Komunikasi		2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70																	
Penyelenggaraan SPBE		2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79																	
Domain Manajemen		1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82																	
Penerapan Manajemen SPBE		1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85																	
Audit TIK		1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73																	
Domain Layanan SPBE		3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67																	
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61																	
Layanan Publik Berbasis Elektronik		3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77																	







Sementara itu, proses pencapaian indikator kinerja pertama ini didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Adapun realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator kinerja pertama adalah sebesar Rp.86.434.550,- dari total pagu sebesar Rp.86.546.900,- atau



persentase penyerapan anggaran adalah 99,87%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 112.350,-.

2) Indikator Kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.4 di atas bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja kedua yaitu “Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” adalah 84,62% atau melebihi dari target 60%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh penyediaan jaringan internet yang berkualitas dan upaya dari masing-masing OPD penyelenggara layanan online kepada masyarakat untuk mengintegrasikan pelayanan dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengutamakan penggunaan Layanan Publik yang sudah ditetapkan menjadi aplikasi umum. Tabel 3.5 disajikan daftar layanan publik Kabupaten Manggarai Barat secara online dan terintegrasi.

Tabel 3. 5  
Daftar Layanan Publik Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Manggarai Barat

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah

12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah

Terdapat 13 layanan Publik yang ada dan 11 diantaranya sudah terintegrasi. Adapun persentase realisasi dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\% \\ &= \frac{11}{13} \times 100\% \\ &= 84,62 \, \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tahun sebelumnya bahwa capaian tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana capaian tahun 2022 yaitu 83,33%, dimana layanan publik yang ada hanya 12 dan yang terintegrasi ada 10. Proses pencapaian indikator kinerja ini adalah didukung oleh penyelenggaraan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam upaya menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.430.800,- Dari total pages subedar Rp. 59.480.000,- atau persentase penyerapan anggaran 99,92%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 49.200,- atau 0,08% dari pagu anggaran.

**3) Indikator Kinerja “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”.**

Indikator Kinerja ketiga yaitu “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”. Berdasarkan capaian yang ditunjukkan pada tabel 3.4, bahwa indikator kinerja ketiga, terealisasi 58,54% dari target 50%, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaiannya adalah 117,08% dengan interpretasi masuk kategori Sangat Baik (A). Keberhasilan Capaian yang baik

ini diperoleh dari keaktifan perangkat daerah dalam menyajikan data statistik sektoral untuk dikompilasi menjadi data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada tahun 2022 hanya 21 OPD yang menyajikan data sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 24 OPD, dan juga peningkatan capaian ini juga dikarenakan Dinas Kominfo aktif memberikan pelatihan kepada OPD tentang menyajikan data statistik sektoral berdasarkan tupoksi masing – masing, sehingga PD yang menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil kinerja juga mengalami peningkatan. Tabel 3.6 berikut ini adalah daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3. 6**  
**Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ya	Ya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya	Ya
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Tidak
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Tidak
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Ya
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Tidak
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak
42.	Kecamatan Ndosso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung persentase jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral berbanding jumlah seluruh OPD Kabupaten Manggarai Barat:

*Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah*

Rumus =  $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

$= \frac{24}{43} \times 100\%$

$= 55,81 \%$

Proses pencapaian indikator ini diperoleh dengan menjalankan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

Dalam upaya menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.963.000,- dari total pagu sebesar Rp. 8.992.500,- atau persentase penyerapan anggaran 99,67%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 29.500,-. atau 0,32% dari pagu anggaran.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir;**

Dalam rangka untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun RPJMD berjalan, maka berikut ini dijelaskan pencapaian dimaksud seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut ini.

**Tabel 3. 7**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2022 dan 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2021	2022	2023
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50 Indeks	3,01 Indeks	3,44 Indeks
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80 %	83,33%	84,62%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	31,71%	51,22%	55,81%

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0.43 indeks jika dibandingkan realisasi tahun 2022, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya penilaian indeks aspek SPBE pada tahun 2023. Selanjutnya adalah indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”, pencapaian realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,29%, peningkatan pencapaian ini didukung oleh penyediaan jaringan internet berkualitas yang semakin massif dan juga upaya dari masing-masing OPD penyelenggara layanan publik online untuk mengintegrasikan pelayanannya. Demikian halnya pada indikator kinerja yang ketiga yaitu indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”, pencapaian realisasi indikator kinerja ini, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,32%. Pencapaian ini didukung oleh semakin meningkatnya Perangkat Daerah menyajikan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Untuk mengetahui dan mengevaluasi realisasi indikator kinerja setiap tahun terhadap target akhir RPJMD, maka dibawah ini dijelaskan realisasi indikator kinerja 2023 terhadap target akhir RPJMD 2026.

**Tabel 3. 8**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2021 - 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD 2026	(%) Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026
1.	Terwujudnya birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks	3,44	3,95	87,09



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD 2026	(%) Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026
	yang kapabel	Elektronik (SPBE)				
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	84,62	100	84,62
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	55,81	80	73,18

1) Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dicermati, bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, tahun 2023 masih belum mampu mencapai nilai indeks seperti pada target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 3,95 indeks atau masih kurang 0,51 indeks. Pencapaian atas indeks SPBE tahun 2023 didukung oleh semakin meningkatnya nilai seluruh aspek penilaian SPBE, adapun aspek penilaian yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3. 9  
Aspek penilaian SPBE tahun 2023

No.	Aspek	Aspek SPBE Target	Aspek SPBE Indeks 2022	Aspek SPBE Indeks 2023
1.	Kebijakan Internal Tata kelola SPBE	2	4,40	5,00
2.	Perencanaan Strategis	2	2,25	2,00
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2,50	2,75
4.	Penyelenggara SPBE	2	3,50	4,00
5.	Penerapan Manajemen SPBE	2	1,75	2,50

No.	Aspek	Aspek SPBE Target	Aspek SPBE Indeks 2022	Aspek SPBE Indeks 2023
6.	Audit TIK	2	3,00	3,00
7.	Layanan Adm Berbasis Elektronik	2	3,30	3,50
8.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2	3,00	4,00

2) Indikator Kinerja Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Selanjutnya yaitu indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”, seperti yang terlihat pada tabel 3.8, juga dapat dipahami bahwa realisasi indikator kinerja yang kedua ini adalah sebesar 84,62% atau masih kurang sebesar 15,38% dari target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” pada tahun 2023 didukung oleh penyediaan akses internet yang berkualitas pada seluruh perangkat daerah dan penyediaan aplikasi layanan umum yang terintegrasi kepada masyarakat, tabel 3.10 dibawah ini yaitu menyajikan daftar layanan publik di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah terintegrasi.

**Tabel 3. 10**  
**Daftar nama aplikasi layanan publik secara online dan terintegrasi**

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan	Sudah

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
		Daerah Kabupaten Manggarai Barat	
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah

3) Indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan

Indikator kinerja ketiga adalah “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”, seperti yang disajikan pada tabel 3.9 terlihat bahwa capaian realisasinya adalah sebesar 55,81%, sedangkan target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 80% atau selisih sebesar 24,19%. Untuk pencapaian indikator ini didukung oleh keaktifan perangkat daerah dalam menyajikan data statistik sektoral untuk dikompilasi menjadi data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat serta menggunakannya untuk perencanaan pembangunan, adapun daftar perangkat daerah yang menyajikan dan menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan pada bidang urusan masing-masing adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.11 berikut ini.

**Tabel 3. 11**  
**Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ya	Ya
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya	Ya
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Tidak
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Tidak
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Ya
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Tidak
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
42.	Kecamatan Ndoso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);**

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 yang memiliki acuan standar penilaian secara nasional adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Standar nasional untuk SPBE Kabupaten adalah 2,6. Kabupaten Manggarai Barat melampaui target nasional. Adapun standar yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.12 di bawah ini.

**Tabel 3. 12**  
**Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2023 dengan target nasional**

Indikator Kinerja		Realisasi	Target Nasional	Capaian terhadap target Nasional
		2023	2023	2023 (%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrionik (SPBE)	3,44 Indeks	2,6 Indeks	132,3 %

**e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Dalam pencapaian indikator kinerja, tentu terdapat faktor – faktor pendukung untuk sebuah keberhasilan atau hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya serta langkah – langkah strategis yang dilakukan sebagai alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat serta alternatif solusi atas permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

**1. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.**

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki acuan untuk

menyelenggarakan SPBE, disamping itu dengan tersedia dasar hukum juga memudahkan layanan secara daring, aplikasi untuk pelayanan memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan lain sebagainya. Kebijakan itu antara lain :

- a. Perbup Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2023;
  - b. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 118/KEP/HK/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 205/KEP/HK/2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat;
  - d. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 110/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 216 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 112/KEP/HK/2023 tentang Computer Security Incident Response Team Kabupaten Manggarai Barat (Manggarai Baratkab-Csirt).
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki tim khusus untuk menyelenggarakan SPBE. Tim tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Nomor 111 / KEP / HK /2023 tentang TIM Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan tanggal 5 April 2023;
  - b. Nomor 200 / KEP / HK /2022 tentang TIM Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2022.
- 3) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membentuk TIM Kolaborasi yang terdiri dari ASN, Non ASN dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam penerapan Sistem Pemerintahan



Berbasis Elektronik yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 216/KEP/HK/2022 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**2. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”**

- 1) Sistem layanan publik dan administrasi secara online pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah 84% lebih terintegrasi pusat data pemerintah pusat, hal ini tercapai karena komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan anggaran yang cukup setiap tahunnya untuk penerapan E-government atau pelayanan publik secara online;
- 2) Tersedianya peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga menjadi dasar dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara online dan terintegrasi;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki infrastruktur yang baik untuk menunjang pelayanan publik secara online, seperti jaringan internet yang memadai pada masing-masing OPD dan juga memiliki akses penyimpanan data pada Pusat Data Nasional (PDN).
- 4) Hal penting lainnya yang menunjang peningkatan layanan publik secara online dan terintegrasi yaitu Pemda Kabupaten Manggarai Barat memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup baik pada masing – masing OPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara online dan terintegrasi.

**3. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”**

- 1) Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyediakan data Statistik Sektoral tahun 2023 yang semakin meningkat;

- 2) Upaya koordinasi yang baik antara Dinas Kominfo sebagai penyelenggara data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat dengan OPD penyedia data;
- 3) BPS Manggarai Barat ikut memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat;
- 4) Komitmen seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerja.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam setiap upaya pencapaian indikator kinerja pastinya didukung oleh sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana pendukung atas program dan kegiatan dimaksud. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya, maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen). Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023.

**Tabel 3. 13**  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		% Tingkat Efisiensi
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/8*100%
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05 Indeks	1.842.836.700	3,44 Indeks	1.557.387.569	112,79	84,51	133,46
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60 %	152.704.600	84,62%	125.427.600	141,03	82,14	171,69
	Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan Pembangunan	50 %	8.992.500	55,81%	8.963.000	111,62	99,67	111,99
Rata – Rata Efisiensi								139,05

1. Data Efisiensi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Efisiensi penggunaan anggaran dalam sebuah institusi pemerintah yaitu dimana realisasi penggunaan anggaran tidak mencapai 100%, namun capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tercapai 100% sesuai rencana yang diinginkan. Tabel 3.14 berikut ini yaitu menyajikan perhitungan efisiensi realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

**Tabel 3. 14**  
**Perhitungan efisiensi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4=2-3
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.370.300	8.267.600	102.700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.747.000	1.721.800	25.200
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.630.681	1.684.966.257	7.664.424
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.516.400	280.701.600	814.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	549.500	530.000	19.500
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.960.000	19.960.000	-
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.394.600	5.380.000	14.600
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
Pendidika dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.500	227.000	10.500
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.077.300	2.034.000	43.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.064.800	20.702.000	362.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.424.200	18.372.000	52.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.528.100	10.175.900	5.352.200
Penyediaan Bahan/Material	2.714.800	2.401.700	313.100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1		2	3	4=2-3
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.590.700	1.573.500	17.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,526.600	26.428.250	98.350
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.762.000	4.756.000	6.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000	120.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.310.800	19.288.000	1.022.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.877.500	22.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	17.433.750	2.966.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.500.000	51.913.900	13.586.100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000	7.098.000	102.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	348.400	344.000	4.400
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.409.900	6.476.700	3.933.200
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.600.000	10.543.050	2.056.950
	Pelayanan Informasi publik	-	-	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	14.330.000	14.255.000	75.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.556.389.800	1.479.183.869	77.205.931
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	93.224.600	65.996.800	27.227.800

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1		2	3	4=2-3
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.000.000	40.000.000	8.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	59.480.000	59.430.800	49.200
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	211.380.000	11.199.950	200.180.050
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	27.066.900	27.003.750	63.150
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.150.000	5.150.000	-
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	3.842.500	3.813.000	29.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan 4 (empat) program, 12 (duabelas) kegiatan dan 9 (Sembilan) kegiatan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.15 di bawah ini.

**Tabel 3. 15**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis**

Kategori	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		5	6
<b>Program</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>84,62</b>	<b>141,03%</b>
		<b>Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok.	1	1	100
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	1	1	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terlayani akses internet yang memadai Persentase penyelesaian pemeliharaan jaringan internet OPD	OPD	41	40	97,56
Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi SPBE yang online dan terintegrasi	Aplikasi	5	16	320
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart City	Dok.	1	1	100



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kategori	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		5	6
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok.	1	1	100
Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Indeks	3,05	3,44	112,79
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>58,54</b>	<b>117,08</b>
Kegiatan	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Dok.	41	24	58,54
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>	<b>16,67</b>	<b>55,56</b>
Kegiatan	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	12	2	16,67

➤ Analisis Capaian Indikator Program Aplikasi Informatika

1. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online

Realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 84,62 % dari target 60 % artinya pencapaian kinerja indikator kinerja Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online adalah melebihi target. Pencapaian ini sangat tinggi karena meningkatnya jumlah aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan pusat data nasional (PDN) dari tahun sebelumnya 10 aplikasi dan tahun 2023 meningkat menjadi 11 aplikasi dari total aplikasi pelayanan publik 13 aplikasi. Daftar aplikasi pelayanan publik secara online dan terintegrasi kabupaten Manggarai Barat yang terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3. 16  
Daftar aplikasi Layanan publik yang terintegrasi tahun 2023

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik dan Layanan Administrasi}} \times 100\% \\ &= \frac{11}{13} \times 100\% \\ &= 84,62\% \end{aligned}$$

2. Indikator “Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi”,

Realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang teintegrasi adalah 60 % dari target sebesar 60 % atau tingkat capaian 100%. Pencapaian ini sangat tinggi karena meningkatnya aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional (PDN), dimana tahun sebelumnya adalah 5 aplikasi dan tahun 2023 6 aplikasi yang terintegrasi. Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan layanan pusat Data Nasional adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3. 17  
Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi tahun 2023

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Layanan Perencanaan	SIPD	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Penganggaran	SIPD	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Keuangan	SIMDA	Belum Terintegrasi
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Simda Aset	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Pengawasan Internal Terkait Pemerintahan	WBS	Belum Terintegrasi
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SAKIP	Belum Terintegrasi
10.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Sudah Terintegrasi

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Administrasi Pemerintahan}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{10} \times 100\% \\ &= 60,00\% \end{aligned}$$

➤ **Analisis capaian indikator Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Target pengelolaan e-Gvernment pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 adalah 23 aplikasi yang terintegrasi, dimana 13 aplikasi untuk pelayanan publik dan 10 aplikasi untuk pelayanan administrasi pemerintahan. Namun jumlah aplikasi yang berhasil diintegrasikan hanya 17 aplikasi. Sementara itu penyediaan akses internet pada masing – masing OPD sudah mencapai 97,67 % atau 42 OPD dari 43 jumlah OPD secara keseluruhan, artinya hampir seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government atau pemerintahan secara elektronik. Di bawah ini adalah data jumlah aplikasi untuk penyelenggaraan e-government di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 dan jumlah perangkat daerah yang memiliki akses internet.

**Tabel 3. 18**  
**Daftar aplikasi untuk penyelenggaraan e-government Pemda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023**

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
A.	<b>Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan</b>		
1.	Layanan Perencanaan	SIPD	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Penganggaran	SIPD	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Keuangan	SIMDA	Belum Terintegrasi
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Simda Aset	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Pengawasan Internal Terkait Pemerintahan	WBS	Belum Terintegrasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SAKIP	Belum Terintegrasi
10.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Sudah Terintegrasi
B.	Aplikasi Pelayanan Publik secara Online		
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah Terintegrasi
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah Terintegrasi
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah Terintegrasi
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum Terintegrasi
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah Terintegrasi
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah Terintegrasi
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah Terintegrasi

Tabel 3.19 dibawah ini adalah data jumlah perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki akses untuk penyelenggaraan e-government tahun 2023.

Tabel 3. 19  
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government tahun 2023

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
3.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
4.	DINAS KESEHATAN							
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
8.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
9.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN							
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							
11.	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI							
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
13.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
14.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM							
15.	INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT							
16.	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN							
17.	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
18.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
19.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							
20.	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
21.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
22.	DINAS PERHUBUNGAN							
23.	BADAN KESBANGPOL							
24.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
25.	SEKRETARIAT DPRD							
26.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
27.	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
28.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
29.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							
30.	SEKRETARIAT DAERAH							
31.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO							
32.	KECAMATAN KOMODO							
33.	KECAMATAN SANO NGGOANG							
34.	KECAMATAN MBELILING							
35.	KECAMATAN LEMBOR							

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	
36.	KECAMATAN LEMBOR SELATAN							
37.	KECAMATAN KUWUS							
38.	KECAMATAN KUWUS BARAT							
39.	KECAMATAN WELAK							
40.	KECAMATAN BOLENG							
41.	KECAMATAN MACANG PACAR							
42.	KECAMATAN NDOZO							
43.	KECAMATAN PACAR							

Persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government, dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah PD yang memiliki akses Internet}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{42}{43} \times 100\% \\ &= 97,67 \, \% \end{aligned}$$

➤ **Analisis Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

1. Indikator Kinerja “Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)”.

Capaian indikator kinerja Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) adalah bertujuan untuk mengukur jumlah layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas kominfo Kabupaten Manggarai Barat melalui website PPID. Jumlah layanan informasi publik yang disajikan oleh Dinas Kominfo tahun 2023 adalah berjumlah 41 informasi dari target 41 informasi pelayanan publik. Berikut ini adalah data informasi publik yang diselenggarakan tahun 2023.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Tabel 3. 20**  
**Daftar diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Tahun 2023**

WhatsApp

Kabupaten Manggarai Barat

← → ↺

Tidak aman https://ppid.manggarai.kab.go.id/document

☆ 📄 📱

Djeda

☰

PPID KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Admin PPID Kabupaten Manggarai Barat

Admin PPID Kabu...

Admin Utama

Download Panduan

Permohonan

Dokumen Informasi Publik

Buat Dokumen

Draft

Semua Dokumen

Informasi Diunduh

Pengguna

Pengaturan

Semua Dokumen

Cari dokumen...

Cetak

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	Surat Edaran Bupati Manggarai Barat	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Badan Keuangan dan Aset Daerah 26 January 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	Surat Edaran Bupati Manggarai Barat tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Bagian Organisasi 22 January 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 7 Tahun 2022	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Bagian Hukum 20 January 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
4	P E N G U M U M A N TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN P3K JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 15 January 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
5	Rencana Strategis Dina Kominfo Kab. Manggarai Barat Priode Tahun 2021-2026	Program dan Kegiatan	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika 13 January 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	SURAT EDARAH HIMBAUAN MELAPORKAN GRATIFIKASI	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Inspektorat Daerah 27 December 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	Pengumuman PPPK Formasi Teknis Manggarai Barat	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 26 December 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	P E N G U M U M A N Jadwal Seleksi Kompetensi Pelamar Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemkab Mabar Tahun 2022	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 07 December 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 7 Tahun 2022	Regulasi	Serta Merta	Bagian Hukum 06 December 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
10	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 01 December 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
11	Instruksi Bupati Manggarai Barat	Program dan Kegiatan	Berkala	Badan Keuangan dan Aset Daerah 25 November 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
12	Pengumuman Lelang 2	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Keuangan dan Aset Daerah 25 November 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
13	Pengumuman Lelang I	Program dan Kegiatan	Serta Merta	Badan Keuangan dan Aset Daerah 25 November 2022	Ubah Hapus Draft Copy Link
14	Instruksi Bupati Manggarai Barat Tentang PPKM Level 2	Program dan Kegiatan	Berkala	Bagian Kesra 17 November 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
15	Surat Edaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 17 November 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
16	Himbauan Bupati Manggarai Barat tentang Kewaspadaan Bencana	Informasi Darurat	Setiap Saat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah 04 August 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
17	Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon ASN di Kab. Manggarai Barat tahun 2021	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 04 August 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
18	Pengaturan Jam Kerja TKD Kabupaten Manggarai Barat	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 02 August 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
19	Surat Bupati Manggarai Barat Tentang Perpanjangan WFH lingkup Pemkab Manggarai Barat	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 21 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
20	Surat Edaran Bupati Manggarai Barat Tentang Pembatasan Jam Kerja ASN dan TKD Linkup Kab. Manggarai Barat	Informasi Darurat	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 12 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
21	Himbauan Bupati Manggarai Barat Kepada Pengurus Rumah Ibadah	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 06 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
22	Instruksi Bupati Manggarai Barat	Informasi Darurat	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 03 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
23	Pengumuman Tentang Pendaftaran Seleksi Calon ASN di Linkup Kab. Manggarai Barat tahun 2021	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 03 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
24	Surat Edaran Pra-RKA Perubahan dan Jadwal Evaluasi APBD Kabupaten Manggarai Barat	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 03 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link
25	Himbauan Bupati Manggarai Barat tentang Pelaksanaan Apel Pagi Bagi ASN dan TKD Manggarai Barat	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 03 July 2021	Ubah Hapus Draft Copy Link

26	Permendagri NO.86 Tahun 2017	Profil Badan Publik	Setiap Saat	Dinas Pengendalian Penduduk, KB P3A 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
27	Latihan	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
28	PERATURAN ARSIP NASIONAL	Regulasi	Serta Merta	Bagian Kesra 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
29	Profile Pimpinan Daerah	Informasi Kinerja	Berkala	Badan Kesbangpol 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
30	profil	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
31	Laporan Kinerja Tahun 2018	Informasi Kinerja	Berkala	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
32	Peserta PBI APBN 2014	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Kesehatan 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
33	Materi	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
34	Profil Kesehatan	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Kesehatan 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
35	demografi kabupaten Manggarai Barat	Hasil Penelitian	Berkala	Kanwil Kementerian Agama 11 October 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
36	BUKU PARIWISTA MANGGARAI BARAT	Program dan Kegiatan	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 04 April 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
37	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN MANGGARAI BARAT	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 02 April 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
38	KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR: 157/KEP/HK/2017	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 01 April 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
39	PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR: 55 TAHUN 2018	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 01 April 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
40	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 01 April 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>
41	MOU Kerjasama Media 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 30 March 2019	<a href="#">Ubah</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Draft</a> <a href="#">Copy Link</a>

Showing 1 to 41 of 41 entries

100 ▾ Items per page

Previous

1

Next

Berikut adalah rumus perhitungan persentase capaian indikator Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)

Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP

Rumus =  $\frac{\text{Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\text{Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$

$\frac{41}{41} \times 100\%$

= 100 %

2. Indikator Kinerja Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

Target komunitas masyarakat/mitra strategis Pemda Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menyebarkan informasi dan kebijakan Pemda adalah 50 komunitas, namun realisasi adalah 45 Komunitas atau persentase capaian 90 %. Pemanfaatan komunitas masyarakat/mitra dalam penyebaran informasi pembangunan daerah bertujuan agar penyebaran

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

52

informasi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat menjadi lebih massif dan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Tabel 3.21 di bawah adalah daftar komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda untuk penyebaran informasi pembangunan.

**Tabel 3. 21**  
**Daftar komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda**  
**Kabupaten Manggarai Barat**

No.	Mitra Komunikasi	Menyebarkan informasidan kebijakan Pemda
1.	KIM Kelurahan Nantal Kec. Kuwus	Ya
2.	KIM Desa Tentang Kec. Ndosso	Ya
3.	KIM Desa Golo Mbu Kec. Sano Nggoang	Ya
4.	KIM Desa Orong Kec. Welak	Ya
5.	KIM Kelurahan Tangge Kec. Lembor	Ya
6.	KIM Desa Tengku Kec. Kuwus Barat	Ya
7.	KIM Desa Cunca Wulang Kec. Mbeliling	Ya
8.	KIM Desa Wae Mose Kec. Lembor Selatan	Ya
9.	KIM Desa Mbuit Kec. Boleng	Ya
10.	KIM Desa Pantar Kec. Komodo	Ya
11.	KIM Desa Siru Kec. Lembor	Ya
12.	KIM Desa Rangu Kec. Kuwus barat	Ya
13.	KIM Desa Pasir Putih Kec. Komodo	Ya
14.	KIM Desa Wontong Kec. Macang Pacar	Ya
15.	KIM Desa Compang Kec. Pacar	Ya
16.	Pos Kupang	Ya
17.	Tribun Flores	Ya
18.	Flores Pos	Ya
19.	NTT Pembaharuan	Ya
20.	Jurnal Flores	Ya
21.	VoxNTT.com	Ya
22.	Kliklabuanbajo.id	Ya
23.	Detikflores.com	Ya
24.	Postntt.com	Ya
25.	Antara.com	Ya
26.	Kitaindonesia.com	Ya
27.	Wartanusantara.com	Ya
28.	Nttpembaharuan.com	Ya
29.	Florescreative.com	Ya
30.	Florespos.com	Ya
31.	Flores editorial.com	Ya
32.	Floresnews.com	Ya
33.	Floresku.com	Ya
34.	Sorotntt.com	Ya
35.	Kabarntt.com	Ya

No.	Mitra Komunikasi	Menyebarkan informasidan kebijakan Pemda
36.	Patrolipost.com	Ya
37.	Policenews.com	Ya
38.	Jurnalbali.com	Ya
39.	RSPD	Ya
41.	TVRI	Ya
42.	AFB TV	Ya
43.	Info Publik	Ya
44.	Padamunegeri.com	Ya
45.	RRI Cabang Ende	Ya
46.	Timex.com	Tidak
47.	Actual.com	Tidak
48.	Matanews.com	Tidak
49.	Victorynews.com	Tidak
50.	Ekora.com	Tidak

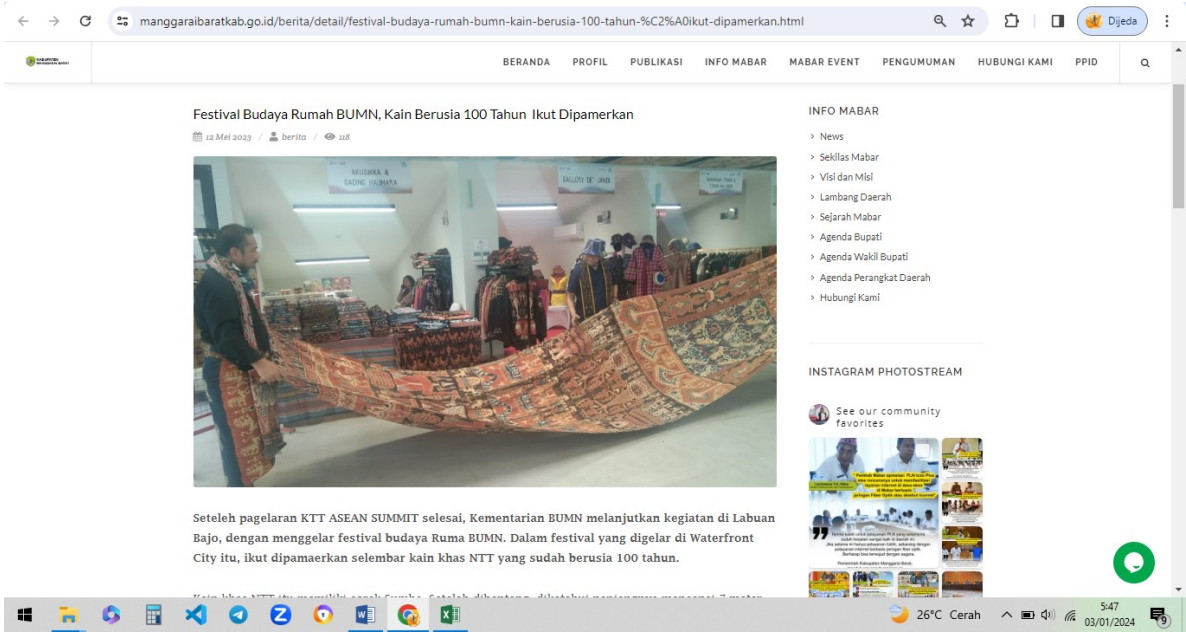
Formula perhitungan persentase jumlah komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\text{Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{45}{50} \times 100 \% \\ &= 90 \% \end{aligned}$$

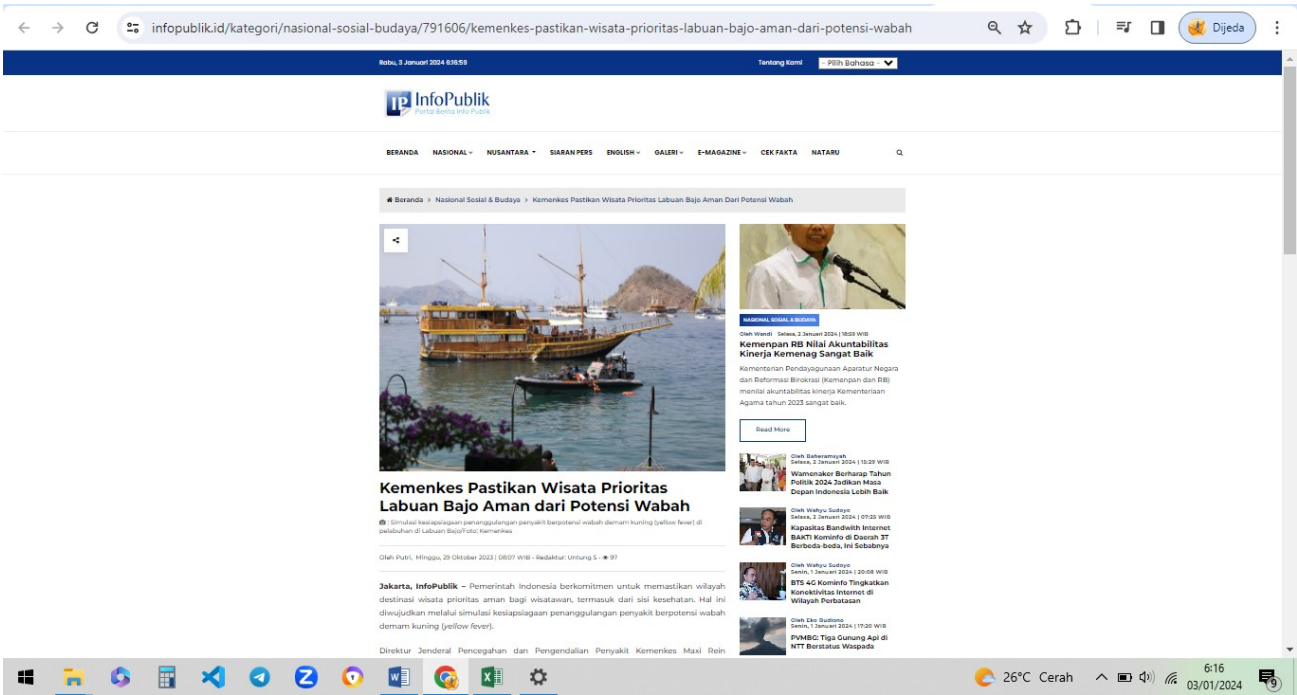
➤ **Analisis capaian indikator Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi, maka pemerintahan daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, perlu menyelenggarakan pengelolaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf f. Capaian Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu 100 %. Capaian yang tinggi ini disebabkan karena pengelolaan konten informasi yang meningkat dimana tahun sebelumnya 980 informasi mencapai 1159 informasi dari target 1159 informasi. Dibawah ini adalah beberapa konten informasi yang telah dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Berita yang disebarakan melalui website Pemda Kabupaten Manggarai Barat ([www.manggaraibaratkab.go.id](http://www.manggaraibaratkab.go.id)) dengan Judul “festival Budaya Rumah BUMN, Kain Berusia 100 Tahun Ikut Dipamerkan”.



Berita yang disebarakan melalui media Infopublik dengan judul “Kemenkes Pastikan Wisata Prioritas Labuan Bajo Aman dari Potensi Wabah”.

➤ Analisis Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator kinerja “Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan”. Tolok ukur indikator kinerja ini adalah jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan data statistik sektoral. Target Perangkat Daerah yang mengumpulkan data statistik sektoral tahun 2023

adalah 22 OPD atau 50% dari total jumlah OPD Kabupaten Manggarai Barat, namun realisasi melebihi target yaitu 24 OPD sehingga persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap adalah 55,81%, maka capaian kinerja menjadi 111,62%. Hasil yang positif ini disebabkan karena semakin meningkatnya perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral. Tabel 3.22 di bawah ini adalah data jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2023.

**Tabel 3. 22**  
**Daftar OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2023**

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Ya	Ya



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektoral
	Desa		
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya	Ya
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Tidak
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Tidak
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Ya
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Tidak
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak
42.	Kecamatan Ndoso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

Berikut ini adalah formula penghitungan persentase jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap.

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Jumlah OPD yang menyajikan data statistik secara lengkap}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{24}{43} \times 100\% \\ &= 55,81\% \end{aligned}$$



➤ Analisis Capaian Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Statistik sektoral merupakan data pembangunan yang bersifat numerik yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah “Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota”. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, sehingga output kinerja adalah 100%. Adapun dokumen yang dimaksud pada output kinerja indikator adalah sebagai berikut.

- 1. Buku Manggarai Barat dalam angka tahun 2022
- 2. Buku PDRB kabupaten Manggarai Barat
- 3. Buku statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat

➤ Analisis Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja “Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE”, terealisasi sebesar 16,67% dari target 30% atau persentase capaian sebesar 55,57%. Capaian indikator ini didukung oleh terlaksananya pengamanan informasi pada aplikasi SPBE dengan menggunakan kode persandian. Adapun rumus perhitungan persentase realisasi adalah seperti berikut ini, sedangkan data aplikasi SPBE yang menggunakan kode persandian adalah disajikan pada tabel 3.23.

Rumus =  $\frac{\text{Jumlah aplikasi persandian yang diterapkan dalam aplikasi SPBE}}{\text{Jumlah aplikasi persandian yang ada}} \times 100\%$

=  $\frac{2}{12} \times 100\%$

= 16,67%

Tabel 3. 23  
Daftar Aplikasi persandian yang diterapkan dalam aplikasi SPBE

No.	Layanan Sesuai Proses Bisnis	Nama Layanan		Nama Aplikasi	Diterapkan dalam SPBE
1.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
		2.	Layanan Pajak PBB online	V-Tax	Sudah
		3.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Belum
		4.	Layanan Data Terbuka	Satu	Belum

No.	Layanan Sesuai Proses Bisnis	Nama Layanan		Nama Aplikasi	Diterapkan dalam SPBE
				Data	
		5.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Belum
		6.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Belum
		7.	Layanan Pajak	Pajak	Belum
		8.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Belum
		9.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
2.	Layanan Administrasi Pembangunan	10.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Belum
		11.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Belum
		12.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Belum

➤ Analisis Capaian Indikator kegiatan penunjang indikator sasaran strategis

Indikator kegiatan penunjang indikator sasaran strategis ini bertujuan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Perangkat Daerah yang umum adalah kegiatan rutin pada bidang sekretariat. Berikut ini adalah capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis dinas.

Tabel 3. 24  
Daftar capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum	1 Laporan	1 Laporan	100

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	Perangkat Daerah			
6.	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
7.	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
8.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Laporan	1 Laporan	100

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang hendak dicapai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA dan DPA-Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **4.262.747.381,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **3.911.325.676,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,76%.**

Karena adanya perlambatan pendapatan asli daerah tahun 2023 sehingga membuat persediaan anggaran pada tahun berjalan tidak cukup memadai, maka pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melakukan *refocusing* anggaran dan perubahan target kinerja kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2023, yaitu:

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK;
2. Bekerja sama dengan provider yang dapat menyediakan jaringan fiber optik yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meminimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik.

Setelah dilakukan analisis capaian kinerja yang mengemukakan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis akuntabilitas

keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 3.25 berikut ini:

Tabel 3. 25  
Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1		2		3		4		5				6
						K	Rp	K	%	Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dok	8	8.370.300	8	100	8.267.600	98,77%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Lap.	7	1.747.000	7	100	1.721.800	98,56%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK		Oran g	23	1.692.630.681	23	100	1.684.966.257	99,55%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dok.	12	281.516.400	12	100	280.701.600	99,71%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dok.	15	549.500	15	100	530.000	96,45%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan	
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap.	1	19.960.000	1	100	19.960.000	100	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>									
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok.	1	5.394.600	1	100	5.380.000	99,73	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OK	10	237.500	24	240	227.000	95,58	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.077.300	1	100	2.034.000	97,92%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.064.800	1	100	20.702.000	98,28%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.424.200	1	100	18.372.000	99,72%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1		2		3		4		5				6
						K	Rp	K	%	Rp	%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	15.528.100	1	100	10.175.900	65,53%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	2.714.800	1	100	2.401.700	88,47%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap.	1	1.590.700	1	100	1.573.500	98,92%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap.	25	26.526.600	25	100	26.428.250	99,63%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok.	1	4.762.000	1	100	4.756.000	99,87%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	3	120.000	0	0	120.000	100	Pengadaan tidak terealisasi sesuai perencanaan karena anggaran difocussing
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Unit	10	20.310.800	7	70	19.288.000	94,96	Pengadaan tidak terealisasi sesuai perencanaan karena anggaran difocussing



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1		2		3		4		5				6
						K	Rp	K	%	Rp	%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lap.	1	3.900.000	1	100	3.877.500	99.42%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Lap.	1	20.400.000	1	100	17.433.750	85.46%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	12	65.500.000	12	100	51.913.900	79.26%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	19	7.200.000	19	100	7.098.000	98.58%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1		2		3		4		5				6
						K	Rp	K	%	Rp	%	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Dok.	4	348.400	1	25	344.000	98,74%	Hasil kegiatan tidak mencapai target karena anggaran direfocussing
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Dok.	2	-	0	0	-	0	Kegiatan tidak terlaksana karena anggaran direfocussing
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Dok.	1	10.409.900	1	100	6.476.700	62.22%	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Dok.	1	12.600.000	1	100	10.543.050	83.68%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Pelayanan Informasi publik		Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik		Dok.	1	-	0	0	-	0	Kegiatan tidak terlaksana karena anggaran direfocussing
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan"		Dok.	1	14.330.000	1	100	14.255.000	99,48	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1		2		3	4		5				6
					K	Rp	K	%	Rp	%	
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok.	1	1.556.389.800	1	100	1.479.183.869	95,04%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	1	93.224.600	1	100	65.996.800	70,79%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dok.	1	48.000.000	1	100	40.000.000	83,33%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplika si	5	59.480.000	5	100	59.430.800	99,92%	Kegiatan terlaksana sesuai Perencanaan
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Dok.	1	211.380.000	1	100	11.199.950	5,30%	Kegiatan terlaksana sesuai Perencanaan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dok.	1	27.066.900	1	100	27.003.750	99,77%	Kegiatan terlaksana sesuai target

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan		Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2		3	4		5				6
				K	Rp	K	%	Rp	%	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>										
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	3	5.150.000	3	100	5.150.000	100	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	OK	5	3.842.500	5	100	3.813.000	99,23	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

BAB IV  
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan satu sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja utama. Dalam melakukan analisa dan evaluasi atas indikator kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melaksanakannya berdasarkan urusan Komunikasi dan Informasi, urusan Statistik dan urusan Persandian. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan tersebut, rata-rata capaian masing-masing indikator adalah 128,81% atau melebihi target 100% dengan capaian tertinggi adalah indikator kinerja “Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi” dengan tingkat capaian 141,03%. Hasil capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dapat kami sajikan seperti tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1  
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,05 Indeks	3,44 Indeks	112,79%
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60 %	84,62%	141,03%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	50%	55,81%	111,62%
Rata-rata capaian indikator kinerja					121,81%

2. Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang akuntabilitas keuangan, bahwa rata-rata penyerapan keuangan dari 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 yaitu sebesar 91,76%, dengan capaian tertinggi yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang memiliki data

statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan sebesar 100% sedangkan penyerapan terendah adalah indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 99,77%.

#### 4.2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran-saran terkait dengan proses penyusunan LAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

1. Mengevaluasi target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
4. Perlu ditingkatkan kerjasama lintas sektoral maupun dengan *stakeholder* yang ada, demi kemajuan di sektor Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian yang pada akhirnya akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai Barat dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Labuan Bajo, 29 Februari 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai Barat, k



**Paulus Setahu, S.Sos.**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 196806292000121004

**LAMPIRAN I**  
**PK Kepala Dinas**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAULUS SETAHU, S, Sos  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDISTASIUS ENDI, SE  
Jabatan : BUPATI MANGGARAI BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Labuan Bajo, 31 Januari 2024

Pihak Kedua  
Bupati Manggarai Barat,

EDISTASIUS ENDI, SE

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai Barat,

PAULUS SETAHU, S, Sos  
NIP. 19680629 200012 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya layanan publik yang secara online dan terintegrasi	Indeks SPBE	3,35
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	73

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.761.665.333	
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	124.773.200	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.604.276.400	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	57.634.800	
	Jumlah	4.548.349.733	

KONTRAK KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN WAJIB PERANGKAT DAERAH


No	Ketepatan Penyampaian	Waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku
1	2	3
1	RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu ke- 2 bulan Agustus
2	Penyampaian DPA SKPD	Paling lambat 9 (sembilan ) hari kerja setelah penetapan APBD
3	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD ( Triwulanan)	Paling lambat tanggal 10 bulan Berikutnya
4	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD ( Semesteran)	Paling lambat tanggal 10 bulan Berikutnya
5	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD (Laporan Keuangan SKPD)	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
6	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD	Paling lambat tanggal 10 bulan Berikutnya
7	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah( LPPD)	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
8	Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
9	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
10	Penginputan RUP	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan APBD
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
12	Dokumen Perjanjian Kinerja	paling lambat 1(satu) bulan setelah DPA disahkan
13	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Paling lambat tanggal 31 Maret



No	Ketepatan Penyampaian	Waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku
1	2	3
14	Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Paling lambat bulan february satu tahun sebelum tahun rencana
15	Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Satu minggu setelah Perkada tentang RKPD Ditetapkan
16	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember
17	Rekapitulasi Laporan Kehadiran ASN dan TKD	Setiap Bulan dan Paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya
18	Realisasi pelaksanaan APBD tingkat OPD	Minimal 95 %
19	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi OPD yang memiliki target pendapatan	100%
20	Tindaklanjut terhadap temuan APIP	100%

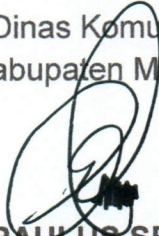
Labuan Bajo, 31 Januari 2024

Pihak Kedua  
Bupati Manggarai Barat,



EDISTASIUS ENDI, SE

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai Barat,



PAULUS SETAHU, S.Sos  
NIP. 19680629 200012 1 004

**LAMPIRAN II**  
**Rencana Aksi**

**RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Target	Target Kinerja Triwulan				Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
						Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									4,548,349,733	Kepala Dinas
	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG KAPABEL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar							2,761,665,333	Sekretaris
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,996,600	Sekretaris
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6 Dokumen	1	1	2	2	9,900,000	Kasubag Keuangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen evaluasi (evaluasi RKPD triwulan 1-4, LAKIP, LPPD, LKPJ)	7 Dokumen	4	1	1	1	3,096,600	Kasubag Keuangan
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,437,764,133	Sekretaris
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK	Menyusun dokumen pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat pada waktunya	14 Dokumen	3	5	3	3	2,199,712,373	Kasubag Keuangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyusun dokumen pembayaran gaji honorarium TKD dan pejabat pengelola keuangan tepat pada waktunya	12 Dokumen	3	3	3	3	235,542,460	Kasubag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Membuat laporan monitoring dan evaluasi keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran OPD	15 Laporan	4	4	3	4	2,509,300	Kasubag Keuangan
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							19,367,400	Sekretaris
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mengelola dan melaporkan hasil penatausahaan barang milik daerah	1 Dokumen				1	19,367,400	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18,675,600	Sekretaris
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Memfasilitasi ASN mengikuti Bimtek	3 OK			2	1	18,675,600	Ksubag Kepegawaian dan Umum


No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Target	Target Kinerja Triwulan				Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
						Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>168,469,600</b>	<b>Sekretaris</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik kantor dan pemancar RSPD	1 Paket				1	8,183,400	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan setiap bulan	1 Paket				1	20,021,700	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menyediakan bahan logistik makan dan minum untuk kebutuhan kantor setiap bulan	1 Paket				1	24,059,700	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Menyediakan ATK dan penggandaan sesuai kebutuhan setiap bulan	1 Paket				1	20,090,200	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Menyediakan bahan material sesuai kebutuhan berupa bahan kebersihan kantor dan biaya jasa cleaning service	1 Paket				1	19,671,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mekukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk mendukung kinerja OPD	25 Laporan	6	6	6	7	71,330,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melakukan penatausahaan arsip dan pembayaran kepada jasa pelayanan kearsipan	1 Dokumen				1	5,113,600	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>42,492,000</b>	<b>Sekretaris</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan materai dan benda pos lainnya untuk keperluan surat menyurat	1 Laporan				1	5,492,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Membayar rekening air, listrik, telepon selama 12 bulan tepat pada waktunya	1 Laporan				1	37,000,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>							<b>61,900,000</b>	<b>Sekretaris</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Melakukan pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas serta peralatan berat sesuai kebutuhan dan kondisi kendaraan dan peralatan	14 Unit		4	7	3	55,500,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Melakukan pemeliharaan rutin peralatan kantor berdasarkan kondisi peralatan dan kondisi mesin kantor	10 Unit	1	1	4	4	6,400,000	Ksubag Kepegawaian dan Umum

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Target	Target Kinerja Triwulan				Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
						Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)							124,773,200	KABID. IKP
			Persentase OPD yang Memiliki PPID Pembantu Aktif								
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat							124,773,200	Jabatan Fungsional Pranata Humas
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Melakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta melakukan peliputan informasi kegiatan pembangunan daerah untuk dipublikasi melalui media resmi pemda Manggarai Barat	2 Dokumen		1		1	8,820,000	Jabatan Fungsional Pranata Humas
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Mengelola konten informasi pada media sosial resmi Pemda Manggarai Barat	1 Dokumen				1	43,936,800	Jabatan Fungsional Pranata Humas
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Melakukan kerjasama dengan komunitas masyarakat serta media lokal dalam rangka penyebarluasan informasi	1 Dokumen				1	72,016,400	Jabatan Fungsional Pranata Humas
		ProgramPengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi							1,604,276,400	KABID. LTKAI
			Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi								
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,604,276,400	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menyediakan fasilitas internet OPD serta melakukan pemeliharaan instalasi jaringan	1 Dokumen				1	1,361,612,900	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Mengelola pusat data pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun	1 Unit				1	29,935,200	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Menjaga keamanan dalam proses pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan antar Instansi baik Pusat maupun Daerah.	1 Dokumen				1	60,000,000	Jabatan Fungsional Manggala Informatika



No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Target	Target Kinerja Triwulan				Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
						Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi berbasis elektronik (online dan terintegrasi)	2 Aplikasi			1	1	50,000,000	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Mengimplementasikan inovasi program yang sesuai dengan masterplan smart city	2 Dokumen				2	102,728,300	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan</b>							<b>57,634,800</b>	<b>KABID. STATISTIK</b>
		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>57,634,800</b>	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen				3	27,848,400	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Menyelenggarakan pelatihan ASN pengelola data statistik sektoral pada masing-masing OPD dengan bekerja sama dengan instansi terkait	5 Orang		5			16,863,800	Jabatan Fungsional Manggala Informatika
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Menyusun metadata statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat	1 Dokumen				1	12,922,600	Jabatan Fungsional Manggala Informatika

Labuan Bajo, 12 Januari 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai Barat, k



**Paulus Setahu, S.Sos.**  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 196806292000121004

**LAMPIRAN III**  
**Pengukuran Kinerja**

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**TAHUN 2023**


NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Formula Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>PERSENTASE URUSAN RUTIN PEMERINTAH YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR</b>					
		<b>A.</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100%
		<b>B.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>			
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Orang	23	23	100%
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	15	15	100%
		<b>C.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
		1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%
		<b>D.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
		1.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100%
		<b>E.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>OK</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>240%</b>
		1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OK	10	24	240%
		<b>F.</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
		3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Formula Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
		5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100%
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100%
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25	100%
		8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100%
		G. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Dokumen	2	1	50%
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	0	0%
		2. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	10	2	20%
		H. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100%
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%
		I. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100%
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100%
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	19	100%

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Formula Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten  $\frac{1159}{1159} \times 100\%$	%	70%	100%	142.86%
				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Jumlah Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah Kabupaten  $\frac{45}{50} \times 100\%$	%	50%	90%	180.00%
				Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Jumlah layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP Jumlah layanan informasi publik  $\frac{41}{41} \times 100\%$	%	70%	100%	142.86%
		A.	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Informasi	1159	1159	100%
		1.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	1	25%
		2.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	0	0%
		3.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100%
		4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	100%
		5.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	0	0%
		6.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	100%

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Formula Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Jumlah layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	%	60	70	116.67%
					Jumlah Layanan Administrasi				
					7 x 100%				
					10				
				Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	84.62	141.03%
					Jumlah Layanan Publik				
					11 x 100%				
					13				
		A.	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	78.26	78.26%
					Jumlah layanan publik dan administrasi				
					18 x 100%				
					23				
		1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
		2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	1	1	100%
		3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100%
		4.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi	5	5	100%
		5.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan	1	0	0%
		6.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Dokumen	1	1	100%
		7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen	1	1	100%

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Formula Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan	Jumlah OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan Jumlah Seluruh OPD $\frac{24}{43} \times 100\%$	%	50	55.81	111.63%
		A. Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100%
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Dokumen	3	3	100%
		2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	5	5	100%

Labuan Bajo, 29 Februari 2024  
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Manggarai Barat, k  
  
**Paulus Setahu, S.Sos.**  
 Pembina Tk.I/IVb  
 NIP. 196806292000121004